PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI JERAT KRIMINALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 658/PID.SUS/2021/PN SBY)

Nanda Wijayanto¹, Nynda Fatmawati Octarina²

^{1,2}Universitas Narotama Surabaya

Email: nandawaw16@gmail.com

ABSTRAK

Pembentukan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU ITE (SKB Implementasi UU ITE) dilakukan oleh pemerintah guna memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang mengalami kriminalisasi menggunakan instrumen UU ITE. Konsumen merupakan salah satu pihak yang mengalami kriminalisasi UU ITE padahal konsumen memiliki hak-hak yang diatur di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kasus yang dialami oleh Stella Monica adalah salah satu contoh terbaru bahwa hakim mengakui prinsip perlindungan hukum terhadap konsumen sehingga konsumen tidak dapat dipidana oleh pelaku usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui ratio decidendi dalam Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/Pn.Sby sehingga memberikan putusan bebas kepada terdakwa sudah sesuai dengan teori perlindungan konsumen serta apakah SKB tentang Implementasi UU ITE dapat digunakan sebagai upaya preventif terhadap perlindungan konsumen dari ancaman tindak Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Bebas yang diterima oleh Stella sudah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap konsumen. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tindakan Stella yang menjadi tuntutan penuntut umum adalah sebuah keluhan, bukan sebagai sebuah pencemaran nama baik. Tindakan "Keluhan" merupakan hak Stella sebagai seorang konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta berlakunya SKB UU ITE dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi konsumen dari jerat pidana UU ITE. SKB memiliki urgensi untuk diberlakukan terhadap seluruh kasus yang menjerat konsumen dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik.

Kata Kunci: SKB Implementasi UU ITE, UU ITE, Perlindungan Konsumen, Stella Monica.

ABSTRACT

The establishment of a Joint Decree on Guidelines for the Implementation of Certain Articles in the ITE Law (SKB Implementation of the ITE Law) was carried out by the government in order to provide legal certainty to people who have been criminalized using the ITE Law instruments. Consumers are one of the parties who experience criminalization under the ITE Law even though consumers have rights regulated in the Consumer Protection Act. The case experienced by Stella Monica is one of the latest examples where judges recognize the principle of legal protection for consumers so that consumers cannot be punished by business actors. The purpose of this research is to find out the ratio decidendi in Decision Number 658/Pid.Sus/2021/Pn.Sby so that giving an acquittal to the defendant is in accordance with the theory of consumer protection and whether the Joint Decree on the Implementation of the ITE Law can be used as a preventive measure against consumer protection from threat of action under Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law concerning the Crime of Defamation?. The research method used is normative juridical research with statutory and case approaches. The results of the study show that the acquittal received by Stella is in accordance with the principles of consumer protection. The judge's consideration stated that Stella's actions which were the demands of the public prosecutor were a complaint, not as a defamation. The action of "Complaint" is Stella's right as a consumer as stipulated in the Consumer Protection Act and the enactment of the Joint Decree

on the ITE Law can be used as an instrument of legal protection for consumers from criminal charges under the ITE Law. The SKB has an urgency to apply to all cases that ensnare consumers with Article 27 paragraph (3) of the ITE Law concerning defamation.

Keywords: SKB Implementation of electronic information and transactions, Law electronic information and transactions, Consumer Protection, Stella Monica

PENDAHULUAN

Jaminan atas kebebasan berekspresi adalah salah satu ciri mutlak negara demokrasi. Setiap orang berhak untuk mengungkapkan kebebasan terhadap ekspresinya selama tidak merugikan orang lain. Dan di Indonesia sendiri hal tersebut telah diatur didalam konstitusi yang termuat dalam ketentuan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE jaminan atas kebebasan berekspresi tersebut mulai terenggut.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat sepanjang tahun 2021 terdapat 38 kasus yang menjerat masyarakat sipil dengan menggunakan instrumen UU ITE. Mengacu pada laporan yang sama, *SAFEnet* juga menyatakan bahwa instrument pasal sering digunakan untuk menjerat kebebasan berekspresi adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada intinya bahwa setiap orang dilarang untuk menyebarkan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui melalui media elektronik. Data tersebut menunjukkan bahwa UU ITE digunakan sebagai sarana untuk membatasi kebebasan berekspresi.

Atas keberadaan pasal tersebut, timbul polemik yang terjadi di masyarakat. Masyarakat menuntut agar dilakukan revisi terhadap UU ITE, penyebabnya karena pasal tersebut tidak memiliki muatan yang jelas tentang unsur-unsur pidana yang dapat disangkakan. Pasal tersebut dianggap multitafsir, karena tidak memiliki tolak ukur yang jelas perihal pelanggaran yang diatur.

Merespon keadaan yang ada, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disebut SKB UU ITE yang ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2021. SKB UU ITE sendiri adalah sebuah ketetapan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut keterangan Menteri Kominfo, penerbitan SKB UU ITE dilakukan untuk menguatkan posisi ketentuan peradilan pidana sebagai *ultimum remidium*, atau pilihan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa SKB UU ITE diterbitkan dengan tujuan agar ketentuan pasal yang dianggap bermasalah dalam UU ITE dapat diselesaikan tanpa melalui mekanisme peradilan pidana. Institusi-institusi yang terlibat dalam kesepakatan tersebut diharapkan dapat mengedepankan penyelesaian perkara tanpa harus melalui pengadilan. Harapannya agar UU ITE tidak serta merta dijadikan sebagai sarana untuk mempidanakan seseorang.

Penerbitan SKB UU ITE menandai babak baru dalam upaya penegakan hukum pidana. Jika sebelumnya penegakan hukum dalam perkara pencemaran nama baik terkesan subjektif karena instrumen pasal yang dianggap karet tersebut seringkali melanggar kebebasan berekspresi masyarakat, dengan SKB diharapkan penegak hukum merespon laporan secara objektif. Sebab selama ini, penegak hukum seolah-olah serampangan dalam merespon laporan pidana yang berkaitan dengan UU ITE.

Salah satu celah konflik yang paling riskan berhubungan dengan UU ITE adalah perihal konflik yang melibatkan konsumen dengan pelaku usaha. Pada era kemajuan teknologi seperti saat ini, konsumen dapat dengan mudah menyampaikan keluhan terhadap barang dan atau jasa yang diterimanya dari pelaku usaha melalui media sosial. Akibat mudah diaksesnya media sosial tersebut, maka keluhan-keluhan tersebut dapat ditafsirkan sebagai sebuah pencemaran nama baik dan oleh pelaku usaha tindakan tersebut dapat diadakan menggunakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Jika mengacu pada teori perlindungan konsumen, Piliphus M Hadjon menjelaskan terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan dengan menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat ditegakkan hukum sebenarnya yang pasti dilakukan di melalu pengadilan. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan

hukum yang bertujuan agar suatu sengketa dapat dicegah. Melalui kedua mekanisme pencegahan tersebut diharapkan dapat terwujudnya upaya perlindungan hukum terhadap konsumen.

Kasus perihal upaya penegakan hukum yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap konsumen terjadi di Surabaya. Kasus yang paling menarik perhatian publik tersebut adalah kasus yang menjerat Stella Monica. Stella Monica, konsumen sebuah klinik kecantikan ternama di Surabaya, Jawa Timur dilaporkan dengan Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena dianggap melakukan pencemaran nama baik. Stella dilaporkan ke Polda Jawa Timur karena unggahan tangkapan layar percakapan dirinya dengan seorang dokter kulit melalui Instastory Instagram. Percakapan tersebut pada intinya berisi curahan hati Stella tentang kondisi kulitnya usai melakukan perawatan di klinik yang dia lakukan pada 2019.

Kasus Stella ini menjadi menarik, karena Stella menyampaikan pendapatnya tersebut dalam kapasitasnya sebagai seorang konsumen. Sebagai konsumen, Stella seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait pasal 4 huruf (d) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi kepolisian untuk tetap memproses laporan tersebut sampai dengan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dituntut dimuka pengadilan.

Pada tahapan tuntutan dimuka pengadilan inilah Stella Monica mendapatkan jawaban atas kasusnya. Melalui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN.Sby, Stella divonis bebas dari segala dakwaan penuntut umum. Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan jaksa berupa postingan Stella Monica di akun Instagram, tidak ada yang mengandung pencemaran nama baik. Hakim menilai bahwa postingan-postingan Stella itu hanya bernada keluhan.

Pertimbangan hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Stella Monica dalam kasus ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih lanjut perihal perlindungan terhadap konsumen dari jerat pidana UU ITE. Peneliti akan melakukan kajian terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Stella.

Pertimbangan hakim tersebut nantinya akan digunakan untuk mengetahui sejauh mana batasan-batasan pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait dengan prinsip perlindungan terhadap konsumen.

KAJIAN TEORITIK

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada dasarnya kejahatan siber merupakan kejahatan yang berkembang dari adanya dampak negatif atas perkembangan aplikasi dan internet. Berbicara kejahatan siber dikenal beberapa jenis kejahatan, antara lain sebagai berikut:

1. *Unauthorized access to computer system and service*

Kejahatan yang dilakukan pada suatu sistem komputer dengan cara yang tidak sah, tanpa izin, maupun tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer.

2. *Illegal contents*

Kejahatan dengan cara memasukkan suatu informasi ke internet dengan tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum serta mengganggu ketertiban umum.

3. *Data forgery*

Kejahatan yang dilakukan dengan cara memalsukan data pada dokumen-dokumen penting.

4. *Cyber espionage*

Kejahatan yang bertujuan memanfaatkan jaringan internet untuk memata-matai suatu kegiatan pihak lain.

5. *Cyber sabotage and extortion*

Kejahatan yang dilakukan dengan cara membuat perusakan, gangguan, dan penhacuran terhadap suatu data program komputer.

6. *Offence against intellectual property*

Kejahatan terhadap hak kekayaan intelektual yang dilakukan secara illegal guna disiarkan pada internet.

7. *Infringements of privacy*

Kejahatan terhadap informasi data pribadi seseorang.

Salah satu upaya guna mengikuti perkembangan teknologi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia ialah melahirkan produk hukum berupa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana telah diketahui oleh umum, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2016. Terbaru, telah diorbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Secara garis besar, tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 undang-undang tersebut. Salah satu rumusan tindak pidana yang akan menjadi fokus penelitian ini ialah mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan tindak pidana merupakan rangkaian kegiatan yang menyampaikan ucapan melalui media sosial elektronik guna menjatuhkan, mempermalukan, atau merendahkan harga diri dan kerormatan orang lain.

Perlu diketahui, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 memberikan penafsiran bahwa mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur norma hukum yang berada dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUH Pidana. Apabila ditinjau dari rumusan unsur delik pidana Pasal 310 KUHP, antara lain adanya kesengajaan, tanpa hak, bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan, serta agar diketahui oleh umum. Sedangkan, rumusan unsur dalam delik pidana pada Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, serta memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Kriminalisasi

Istilah kriminalisasi sederhananya merupakan tonggak awal dalam merumuskan suatu peraturan guna memberlakukan hukum materiil pidana. Arti dari kriminalisasi sendiri menurut Persak yaitu penilaian apakah suatu perbuatan tersebut merupakan tindak pidana serta pemberlakuan sanksi yang tepat dan tegas dari adanya tindak pidana tersebut. Pengertian ini memiliki kesinambungan dengan pengertian hukum pidana dari Moeljatno, yakni hukum pidana diadakan untuk tujuan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut.

Lebih lanjut, berkaitan dengan kriminalisasi salah satu pendapat dari Muladi, terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan berkaitan dengan doctrinal kriminalisasi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Konsep kriminalisasi harus memiliki batasan agar tidak menimbulkan konsep overkriminalisasi;
- 2) Konsep kriminalisasi tidak dapat dilakukan dengan sifat khusus;
- 3) Konsep kriminalisasi wajib mementingkan sudut pandang korban, baik itu korban langsung atau orang yang berpotensi menjadi korban;
- 4) Konsep kriminalisasi wajib memperhitungkan biaya dan hasil atas penerapannya serta mengutamakan prinsip *ultimum remedium*;
- 5) Konsep kriminalisasi wajib menghasilkan produk peraturan perundang-undangan yang prinsipnya dapat dilaksanakan;
- 6) Konsep kriminalisasi wajib mendapatkan dukungan publik;
- 7) Konsep kriminalisasi wajib mengandung unsur subsosialitet;
- 8) Konsep kriminalisasi wajib memperhatikan bahwa peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat serta memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan formulasi kebijakan pidana tersebut.

Pandangan batasan-batasan konsep kriminalisasi dari Muladi ini sebenarnya berkesinambungan dengan asas *the rule of law*. Kesinambungan yang dimaksud antara lain, kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan wajib secara umum serta keputusan

pembentukan peraturan perundang-undangan dapat melakukan kebijakan kriminalisasi secara khusus.

Teori Perlindungan Konsumen

Perlu disadari bahwa perlindungan konsumen merupakan akibat dari adanya kemajuan teknologi dan industri. Perluasan arus transaksi saat ini dapat dikatakan tidak terbatas, baik transaksi antar negara ataupun dalam negara. Oleh sebab itu, perlunya payung hukum berkaitan dengan perlindungan konsumen saat ini ialah sangat tepat. Kondisi seperti ini terkadang menguntungkan pihak konsumen hingga dapat juga merugikan pihak konsumen karena seringkali konsumen berada pada posisi yang lemah. Kedudukan ini menyebabkan ketidakseimbangan antara konsumen dengan produsen dalam transaksi suatu produk.

Upaya pelindungan hukum terhadap konsumen memiliki sejarah yang panjang agar dapat terwujud. Secara umum, terdapat 4 tahapan terhadap upaya pelindungan hukum bagi konsumen. Berikut adalah tahapan perkembangan perlindungan konsumen:

1) Tahapan I (1881-1914)

Tahapan ini menjadi tonggak pertama atas kesadaran perlunya perlindungan konsumen, dengan didasari pada salah satu isu pengolahan pabrik daging di Amerika Serikat yang tidak higienis.

2) Tahapan II (1920-1940)

Pada tahapan ini, konsumen mulai sadar atas hak-haknya sebagai pembeli dan pemakai jasa dari produsen ataupun penyedia jasa. Tahapan ini juga memunculkan prinsip *fail deal, best buy*.

3) Tahapan III (1950-1960)

Pada tahapan ini, mulai muncul adanya inisiasi untuk membentuk persatuan gerakan perlindungan konsumen yang diprakarsai oleh Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, dan Belgia yang dibarengi dengan berdirinya *International Organization of Consumer Union* pada tanggal 1 April 1960.

4) Tahapan IV (Pasca 1960-an)

Tahapan ini merupakan pematapan dengan inisiasi untuk pembentukan persatuan gerakan perlindungan konsumen baik pada tingkat regional maupun internasional.

Tahapan-tahapan tersebut terus berlanjut, seperti halnya PBB pun juga mengeluarkan Resolusi PBB No. 39/248 tentang perlindungan konsumen pada tahun 1985. Resolusi tersebut pada intinya menekankan hak-hak konsumen yang perlu dilindungi ialah:

- 1) Perlindungan dari bahaya yang mengancam kesehatan dan keamanan konsumen;
- 2) Pentingnya promosi perlindungan kepentingan sosial konsumen;
- 3) Wajib menyediakan informasi yang memadai bagi konsumen;
- 4) Tersedianya pendidikan konsumen;
- 5) Tersedianya mekanisme ganti rugi yang efektif dan efisien;
- 6) Adanya kebebasan untuk menentukan dan membentuk organisasi perlindungan konsumen.

Berkaitan dengan pengertian konsumen sendiri, dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- 1) Konsumen komersial, yakni orang yang memperoleh barang/jasa dengan maksud penggunaannya untuk memproduksi kembali barang/jasa tersebut demi keuntungan;
- 2) Konsumen antara, yakni orang yang memperoleh barang/jasa dengan maksud penggunaannya untuk memperdagangkan kembali sehingga memperoleh keuntungan. Konsumen ini juga seringkali dikenal dengan istilah distributor.
- 3) Konsumen akhir, yakni orang yang memperoleh barang/jasa dengan maksud penggunaannya untuk tujuan memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Secara historis, sebelum terbitnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebetulnya peraturan perundang-undangan Indonesia telah berusaha untuk memenuhi unsur-unsur perlindungan konsumen, misalnya saja pengaturan pemalsuan di KUHP. Akan tetapi, hingga tahun 1999 sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan perundang-undangan yang telah ada belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum mengenai hak-hak konsumen. Hingga akhirnya terdapat gerakan perlindungan konsumen di Indonesia setelah berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 1973 serta Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) pada tahun 1988. Keberadaan 2 (dua) lembaga tersebut berhasil menciptakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada 20 April 1999.

Konsep utama dari teori perlindungan konsumen adalah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menegaskan tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakain barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung-jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Secara garis besar, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengatur berkaitan dengan hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen. Selain itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga diatur mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Beberapa larangan tersebutlah yang menjadi suatu tindak pidana apabila dilanggar. Larangan-larangan tersebut secara lengkap diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan penelitian yuridis normatif. penelitian hukum normatif biasanya disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian normative sendiri adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum,

prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

Penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisa dengan dasar kerangka hukum melalui pandangan teoritis dan peraturan perundang-undangan. Tipe penelitian ini nantinya akan menggunakan beberapa bahan hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum itu nantinya akan membantu peneliti dalam menarik suatu kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, penelitian ini akan memfokuskan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta SKB Implementasi UU ITE. Selain itu, nantinya akan didukung dengan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Kemudian, pendekatan konseptual akan memfokuskan pada tinjauan secara konsep hubungan dari perlindungan konsumen dengan informasi dan transaksi elektronik serta fenomena kriminalisasi. Terakhir, penelitian ini juga merujuk pada kasus dalam putusan perkara nomor 658/PID.SUS/2021/PN SBY.

Sebagaimana disebutkan pada poin sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan beberapa bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, SKB Implementasi UU ITE serta putusan perkara nomor 658/PID.SUS/2021/PN SBY.

Kedua, bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.

Ketiga, bahan non hukum. Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS PUTUSAN BEBAS STELLA DALAM PERKARA NOMOR 658/PID.SUS/2021/PN.SBY DITINJAU DARI TEORI PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kronologis Perkara Nomor 658/Pid.Sus/2021/Pn Sby tentang Pencemaran Nama Baik

Kronologi adalah ilmu yang berkaitan dengan perhitungan waktu tentang rentetan suatu kejadian atau peristiwa. Melalui penyusunan kronologi dapat diketahui tentang hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan suatu kejadian atau peristiwa dapat terjadi. Dengan mengetahui kronologi, maka upaya penyelidikan untuk mengetahui penyebab suatu peristiwa dapat terjadi dapat dilakukan dengan mudah.

Dalam sebuah perkara hukum pidana, mengetahui kronologi adalah hal wajib yang perlu diketahui oleh hakim. Hakim akan menggunakan rangkaian kronologi guna membuat sebuah pertimbangan hukum. Meskipun begitu, tidak semua peristiwa yang terdapat dalam kronologi yang akan dijadikan dasar pertimbangan hakim. Hanya peristiwa hukumlah yang akan digunakan oleh hakim dalam sebuah pertimbangan guna menjatuhkan sebuah putusan.

Peristiwa hukum pidana sering pula disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Sebuah peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai suatu peristiwa pidana jika memenuhi unsur pidana objektif dan unsur pidana subjektif. Unsur pidana objektif adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan daiatur ancaman hukum bagi yang melakukan. Unsur pidana subjektif adalah perbuatan atau tindakan yang berakibat tidak dikehadaki oleh undang-undang.

Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/Pn Sby untuk selanjutnya disebut sebagai perkara aquo adalah perkara UU ITE tentang pencemaran nama baik yang diperiksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Terdakwa dalam kasus ini adalah Stella Monica Hendrawan anak dari Stevanus Hendrawan untuk selanjutnya disebut sebagai Stella. Stella dalam hal ini didakwa telah melakukan perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik

Pada perkara aquo, penulis merangkum peristiwa pidana yang terjadi dalam kasus Stella sehingga Stella harus menjalani proses pemeriksaan di Pengadilan. Kronologi kasus Stella bermula saat Stella menjadi konsumen di Klinik L'Viors dengan melakukan perawatan

kecantikan di klinik tersebut. Merasa tidak puas dengan hasil pelayanan yang diberikan, Stella kemudian mengunggah hasil perawatan yang dialami di media sosial Instagram. Unggahan tersebut kemudian dikomentari oleh *followers* Stella melalui *Direct Message* (DM) Instagram. DM tersebut yang berisi tentang respon *follower* Stella di Instagram kemudian diunggah oleh Stella menjadi 3 konten Story Instagram berkaitan dengan pengalaman dirinya dan teman temannya mengenai perawatan pada Klinik L'viors, melalui akun instagram @stellamonica.h pada tanggal 29 Desember 2019 sebagai berikut:

Pertama, percakapan Stella dengan Saksi Thio Dewi Kumala Wihardja. Pesan Saksi Thio Dewi Kumala Wihardja sebagai berikut *"hahaha kalau aku dah masuk sampah sejak sebulan pake stel. Gila wes habis 7jt malah jadi uajor. Dan ternyata... dokter disana itu dokter umm stel, bukan dr muka"*. Pesan tersebut memiliki arti, hahaha kalau aku sudah masuk sampah sejak sebulan pake, Stel. Gila udah abis 7 juta t malah jadi ancur. Dan ternyata... dokter disana itu dokter umum Stel, bukan dokter muka. Respon Stella, *"and ada lagi !!....."* yang memiliki arti: dan ada lagi!

Kedua, percakapan Stella dengan Saksi Marsha Sashiko. Pesan Saksi Marsha Sashiko *"dulurku yo ngujok2i aku nde Ivoir, soale mukak e malah menjadi2 pas kesana, katae kondisi kulit kuna terburuk sepanjang hidup...."* yang memiliki Arti: saudaraku juga ngelarang aku ke Ivoir, soalnya mukanya malah menjadi-menjadi pas ke sana, katanya kondisi kulit kuna terburuk sepanjang hidup". Respon Stella *"dan sukanya dikit2 main suntik kl ada jerawat di dalem"* yang artinya: "dan sukanya sedikit-sedikit main suntik kalau ada jerawat di dalem".

Ketiga, percakapan Stella dengan Saksi Adelina Wijaya Ajie. Pesan Saksi Adelina Wijaya Ajie *"Kebacot Kapanan wkt km post2 Ivior itu mayan lama to tk kira km cocok stel soale kadang itu dokter emang cocok-cocokan tapi ini wis banyak kasus gn mnrtku dee gak bener si dan kasian kalo cewe jadi kayak gini maksud tujuan mau buat muka bagus ga murah juga eh malah gitu gak genah belas se"* yang memiliki artinya: kelewatan kapan hari waktu kamu post-post Ivior itu lumayan lama kan kukira kamu cocok stel soalnya kadang tuh dokter emang cocok-cocokan tapi ini dah banyak kasus gini menurutku dia ga bener sih ga bener banget dah. Respon Stella *"“Aku gasukae ya, bilang e cream'e aman gak ada steroid, jelas2 ame gonta ngmg gak mungkin cream racikan gak ada steorid soale steroid itu sg bikin muka lbh cerah + gak gampang jerawat, iya!!!" L'VOIR muahal lin..."* yang memiliki arti: Aku ga

sukanya ya, bilangnya creamnya aman ga ada steroid, jelas-jelas ame gonta ngomong ga mungkin cream racikan ga ada steroid soalnya steroid itu yang buat muka lebih cerah dan ga gampang jerawat, iya!!! L'VOIR mahal banget lin.

Ketiga postingan tersebut yang diunggah oleh Stella kemudian diketahui oleh saksi Jenifer Laurent Hussein selaku staf marketing Klinik L'iviors. Saksi Jenifer kemudian menyampaikan temuannya tentang postingan Stella di Instagram kepada pimpinan klinik. Pimpinan klinik L'IVIORS yang diwakili oleh saksi Irene Christilia Lee merasa dirugikan dengan adanya postingan story Stella. Irene menjelaskan bahwa dengan adanya postingan tersebut yang dilihat oleh banyak orang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan atau pemikiran negatif terhadap klinik L'IVIORS sehingga membuat reputasi klinik menjadi jelek dan konsumen tidak mau mendatangi klinik L'IVIORS kembali.

Atas dasar tersebut, pihak klinik yang diwakili oleh pengacara kemudian mengirimkan surat somasi kepada Stella. Stella disomasi dengan alasan bahwa telah mencemarkan nama baik Klinik L'IVIORS. Stella dituntut untuk memenuhi permintaan somasi dengan menerbitkan permintaan maaf di media masa (koran) minimal setengah halaman untuk tiga kali penerbitan berbeda hari.

Stella merasa keberatan dengan permintaan somasi yang dilayangkan terhadapnya. Kemudian Stella berinisiatif melakukan negosiasi agar permohonan somasi diperingan, namun pihak klinik menolak hal tersebut. Pihak klinik kemudian melaporkan Stella kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk selanjutnya disebut Polda Jatim atas dugaan pelanggaran pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Polda Jatim. Pihak kepolisian kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap Stella. Stella kemudian pada tanggal 7 Oktober 2020 ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Jatim. Berkas penetapan tersangka Stella kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk selanjutnya disebut Kejati Jatim agar diajukan tuntutan ke pengadilan.

Jaksa mendakwa bahwa Stella telah sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Atas perbuatannya tersebut, Stella dituntut oleh penuntut umum untuk dipenjara selama 1 tahun dan denda Rp 10.000.000,-

Majelis Hakim kemudian yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memberikan putusan yang berbeda dari permintaan penuntut umum. Majelis hakim menolak seluruh tuntutan penuntut umum. Majelis hakim memutuskan bahwa Stella tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Majelis hakim juga memerintahkan agar JPU memulihkan seluruh hak dan martabat Stella serta mengembalikan seluruh bukti-bukti kepada Stella.

Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 658/Pid.Sus/2021/Pn Sby tentang Pencemaran Nama Baik

Pertimbangan Hakim menjadi bagi terpenting dalam menentukan sebuah keputusan perkara yang diperiksa dan diadilinya. Pertimbangan tersebut harus didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (2) tentang UU Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menyampaikan pertimbangan tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan yang dibuatnya.

Pada perkara aquo hakim menjatuhkan putusan kepada Stella dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Stella Monica Hendrawan Anak dari Stevanus Hendrawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Stella Monica Hendrawan Anak dari Stevanus Hendrawan dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama @stellamonica.h, 1 (satu) bendel kartu pasien klinik L?VIORS atas nama Stella Monica Hendrawan dan 1 (satu) bendel bukti screenshot percakapan DM (Direct message) Instagram Terlampir dalam berkas perkara ;
 - b. 1 (satu) unit HP Iphone XR warna merah IMEI 358798090546000 dan 358798090971661 dikembalikan kepada terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Putusan tersebut pada intinya menyatakan bahwa Stella dinyatakan bebas. Putusan bebas yaitu putusan yang menyatakan bahwa terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Dasar putusan bebas diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada intinya menyatakan bahwa pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Dalam perkara aquo, penulis akan menguraikan dasar pertimbangan hakim yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan bebas kepada Stella. Pertama-tama, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai dakwaan yang dijatuhkan kepada Stella dalam perkara aquo. Penuntut Umum mendakwa Stella dengan dakwaan tunggal. Dakwaannya hanya tunggal digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan.

Jaksa mendakwa Stella melanggar ketentuan pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;
3. Mendistribusikan dan \ atau mentransmisikan dan \ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan \ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan \ atau pencemaran nama baik;

Berdasarkan unsur-unsur yang ada, penuntut umum menuntut Stella untuk dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Tuntutan tersebut didasarkan bahwa Stella telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik.

Merespon dakwaan penuntut umum, tim penasehat hukum menyampaikan bantahan. Penasehat hukum menyampaikan bantahan yang pada intinya menyatakan bahwa

Stella tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Atas dakwaan dan pembelaan baik yang dilakukan oleh penuntut umum dan penasehat hukum, serta menimbang bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan kepengadilan, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.

Pertama adalah unsur setiap orang. Hakim pada perkara menyatakan dalam perkara aquo bahwa unsur setiap orang dalam perkara aquo sudah terpenuhi. Majelis hakim menyatakan bahwa setiap orang di sini adalah siapa aja yang dipandang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 21 UU ITE yang pada intinya menyatakan bahwa menyebutkan yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum.

Pertimbangan tersebut kemudian menggugurkan argumentasi penasehat hukum Stella yang menyatakan bahwa pelapor dalam perkara ini tidak mempunyai kewenangan untuk melaporkan terdakwa karena hal ini adalah delik aduan. Penasehatan hukum menyampaikan argumentasi bahwa pelaporan yang dalam hal ini adalah badan hukum tidak memiliki hak untuk menyampaikan laporan di kepolisian. Meskipun begitu, dalam pertimbangannya majelis hakim menyampaikan bahwa saksi Irene Christelia Lee yang menyatakan pada tanggal 19 februari 2020 melaporkan dengan surat kuasa dari saksi Rudi sebagai pemilik Klinik L'VIORS hal tersebut dibenarkan oleh saksi Rudi Santoso yang mendapat kuasa dari Direktur L'VIORS Hanna Setiawan untuk menjalankan kepengurusan perusahaan sehingga menurut Majelis Hakim alas an Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan.

Penulis sepakat terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa badan hukum memiliki hak untuk menyampaikan laporan di kepolisian. Badan hukum termasuk subjek hukum, sebagai subjek hukum badan hukum mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Jika mengacu pada teori kenyataan yuridis yang menyatakan bahwa adan hukum adalah

merupakan kenyataan/realitas yuridis yang dibentuk dan diakui sama seperti manusia pribadi, kehendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja, maka tindakan yang dilakukan oleh Klinik L'VIOR untuk melaporkan Stella adalah haknya sebagai subjek hukum.

2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak.

Kedua adalah unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kedua yaitu dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi. Majelis Hakim dalam perkara aquo mendefinisikan bahwa "Sengaja" menurut MVT (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) sehingga dapat diartikan pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang akibat dari apa yang dilakukan. Dengan demikian pengertian kesengajaan adalah sikap batin seorang pelaku yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku. Sedangkan definisi "tanpa hak" menurut majelis hakim adalah setiap perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau setiap perbuatan dilakukan tanpa ada kewenangan untuk itu. Pertimbangan tersebut juga dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No.50\PUU VI\2008, menyatakan " Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" berarti pelaku menghendaki dan mengetahui secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak, maksudnya pelaku tidak memiliki hak baik yang diberikan oleh perundang undang, perjanjian, atau alas hukum yang sah.

Pertimbangan hakim tersebut juga didasarkan pada alat bukti screenshot percakapan Direct Message (DM) yang Stella unggah di Instagram pribadinya @stellamonica.h. DM tersebut terdiri dari:

1. Gambar pada percakapan dengan saksi THIO DEWI KUMALA WIHARDJA dengan akun yang bernama @dewikumala dan kalimat yang ditulis Hahahaha kalau aku dah masuk sampah sejak sebulan pake stel .gila wes habis 7jt malah jadi uajor. Dan ternyata..... Dokter disana itu dokter umum stel, bukan dr muka yang disisipkan kata kata yang ditulis oleh akun Instagram yang bernama @stellamonica.h yaitu and ada lagi.

2. Gambar percakapan dengan saksi MARSHA SASHIKHO dengan akun yang bernama @shashasui dari kalimat yang ditulis dulurku ya ngujok2i aku nde Ivior,soale mukak e malah menjadi2 pas kesana,katae kondisi kulit kuna terburuk sepanjang hidup..... dan disisipkan kata kata yang ditulis oleh akun Instagram yang bernama @Stellamonica.h yaitu Dan Sukanya dikit2 main suntik kl ada jerawat di dalam.
3. Gambar percakapan dengan saksi ADELIN WIJAYA ALIE dengan kalimat yang ditulis oleh akun yang diblur dan kalimat yang ditulis Kebacot wkt post2 Ivor ,itu mayan lama to,tk kira km cocok stel, soale kdg itu, dokter emg cocok2 an,tp ini wis banyak kasus gn,mnrtku dee gk bener si,dan kasian klo cewek jd ky gn, mksd tujuan mau buat muka apik , g murah jg ,eh malah gt ,gak genah belas se..... dan balasan percakapan yang ditulis oleh terdakwa dalam akun Instagram yang bernama @Stellamonica.h antara lain Aku gasukae ya, bilange cream e aman ga ada steroid soale steroid itu sg bikin muka lbh cerah + gak gampang jerawat ,iya!!! L' VIORS muahal lin....

Hakim berpendapat bahwa tindakan Stella yang mengunggah screenshot percakapan Direct Message (DM) tersebut adalah untuk sharing atau berbagi terhadap teman teman di media sosial Instagram dan kondisi yang dialami terdakwa menjadi pasien di Klinik L'IVORS yang hasil pengobatan jerawat tidak sesuai yang diharapkan \ semakin pasrah atau kegagalan Klinik I' VIORS dalam menangani para pelanggannya. Akibatnya perbutannya, Klinik L'VIORS yang diwakili oleh saksi IRENE CHRISTILIA LEE merasa dirugikan karena postingan story Instagram terdakwa banyak dilihat oleh orang banyak dapat menimbulkan ketidakpercayaan atau pemikiran yang negative terhadap Klinik L'IVORS sehingga membuat reputasi Klinik L' IVORS menjadi jelek dan customer tidak mau ke Klinik L'IVORS dan Klinik L'IVORS telah memperingatkan dan meminta Terdakwa untuk minta maaf. Dengan demikian, perbuatan terdakwa yang memposting percakapannya yang menyangkut Klinik L'IVORS dalam story Instagram di akun Instagram @stellamonica.h milik terdakwa dengan followers sekitar 2000 sehingga dapat dibaca oleh orang lain sebagai pengikutnya atau followers menunjukkan terdakwa sudah mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut sedangkan terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk itu sehingga unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi.

3. Unsur Mendistribusikan dan \ atau mentransmisikan dan \ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan \ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan \ atau pencemaran nama baik.

Unsur yang ketiga adalah unsur mendistribusikan dan \ atau mentransmisikan dan \ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan \ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan \ atau pencemaran nama baik. Hakim berpendapat bahwa mendistribusikan adalah tindakan seseorang untuk secara sengaja untuk menyebarkan luas suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik kepada orang lain dalam jumlah banyak dan mentransmisikan adalah tindakan seseorang mengirimkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada pihak lain yang diketahui persis akan menerimanya melalui suatu system elektronik.

Perihal informasi elektronik, majelis hakim menyatakan bahwa suatu atau sekumpulan data elektronik , termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto ,*electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 4 UU ITE menyebutkan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital , elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat , ditampilkan , dan / atau didengar melalui komputer atau system elektronik , termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perihal penghinaan dan / pencemaran nama baik, majelis hakim mendefinisikan Bahwa Penghinaan dan / atau pencemaran nama baik adalah tulisan maupun perkataan atau ucapan yang menyangkut penghinaan dan / atau pencemaran nama baik yang mana bahasa yang termuat dalam tulisan atau perkataan tersebut dapat menimbulkan perasaan rendah, dapat menimbulkan ketersinggungan serta dapat menimbulkan martabat seseorang jatuh baik lisan (ucapan) maupun tulisan.

Majelis hakim juga menyampaikan pertimbangan atas pembelaan dari penasehat hukum Stella mengenai unsur pencemaran dan penghinaan hanya dapat ditunjukkan kepada orang bukan badan seperti Klinik L'VIORS. Atas pembelaan tersebut, Majelis Hakim telah ada perluasan penafsiran terhadap pelaku tindak pidana selain orang adalah badan hukum seperti disebutkan dalam pasal 1 angka 21 UU nomer 11 tahun 2018 tentang ITE sehingga menurut Majelis Hakim perluas penafsiran tersebut dapat diperlukan terhadap obyek dari tindak pidana, oleh karena itu keberatan penasihat hukum dikesampingkan oleh mejelis hakim.

Majelis hakim juga memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang ada didalam persidangan. Majelis hakim berpendapat, unsur mendistribusikan dan mentransmisikan telah terpenuhi melalui tindakan Stella yang memposting tangkapan layar pecakapannya di Instagram sehingga dapat dilihat oleh orang lain.

Lebih lanjut perihal unsur muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, berdasarkan pertimbangan hakim, unsur tersebut tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya unsur tersebut dikarenakan fakta bahwa Stella adalah adalah pasien dari Klinik L'VIORS yang mendapatkan tindakan perawatan serangkaian perawatan dan didukung berdasarkan bukti yang ada, maka majelis hakim menyimpulkan tindakan yang dilakukan oleh Stella adalah keluhan sebagai seorang pasien. Dengan demikian maka unsur penghinaan dan pencemaran nama baik tidak terbukti.

Berdasarkan pertimbangan hakim atas unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang Pencemaran Nama Baik, terhadap unsur penghinaan dan pencemaran nama baik tidak terbukti. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dengan tidak terbuक्तinya unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, maka Stella haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum. Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa karena Stella dibebaskan dari dakwaan, maka hak-hak serta martabat Stella harus dipulihkan.

Analisis Putusan Perkara Nomor 658/Pid.Sus/2021/Pn Sby tentang Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen

Putusan bebas yang diterima Stella dalam perkara aquo menjadi kemenangan atas pewujudan perlindungan hukum terhadap konsumen. Hakim dalam pertimbangan hukumnya

menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Stella dalam melakukan transmisi elektronik bukanlah tindakan pencemaran nama baik melainkan sebuah tindakan keluhan. Atas pertimbangan tersebut, maka seluruh dakwaan yang ditujukan kepadanya menjadi gugur dan Stella dinyatakan bebas dari dakwaan penuntut umum.

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa materi muatan yang terdapat dalam unggahan instratory milik Stella adalah sebuah perbuatan keluhan menjadi kunci utama dalam pemberian vonis bebas yang diterima Stella. Tindakan yang dilakukan oleh Stella tersebut dengan menyampaikan keluhan merupakan hak stella sebagai seorang konsumen. Hak tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 4 angka (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang pada intinya menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Konsumen yang menyampaikan keluhan dalam dunia usaha merupakan hal yang wajar. Menurut Bell dan Luddington, keluhan konsumen (*customer complaint*) adalah umpan balik (*feedback*) dari pelanggan yang ditujukan kepada perusahaan yang cenderung bersifat negatif. Umpan balik ini dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Daryanto dan Setyabudi yang mendefinisikan Komplain atau keluhan adalah pengaduan atau penyampaian ketidakpuasan, ketidaknyamanan, kejengkelan, dan kemarahan atas service jasa atau produk.

Tindakan Klinik L'IVIORS selaku pelaku usaha yang melaporkan Stella yang dalam hal ini adalah konsumen sungguhlah sangat disayangkan. Sebab, bagi pelaku usaha, merespon keluhan konsumen merupakan sebuah kewajiban. Kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan pasal 7 huruf a, huruf b, huruf f dan huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada intinya pasal-pasal tersebut mengatur sebagai berikut:

1. Huruf (a), pelaku usaha wajib beritikad baik dalam menjalankan usahanya;
2. Huruf (b), pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Huruf (f) pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

4. huruf (g), pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima.

Pelaku usaha yang mendapatkan respon berupa keluhan konsumen seharusnya mampu meresponnya dengan baik. Keluhan yang ada seharusnya diolah dan dapat dioptimalkan untuk kepentingan bisnis. Menurut Laboeuf menjelaskan terdapat tiga alasan mengapa keluhan konsumen dapat memberikan keuntungan, yaitu:

1. Keluhan memperlihatkan bidang-bidang yang membutuhkan perhatian dan perbaikan;
2. Keluhan adalah kesempatan kedua untuk memperbaiki pelayanan dan kepuasan terhadap pelanggan yang kecewa;
3. Keluhan merupakan suatu peluang untuk memperkuat loyalitas pelanggan.

Melihat fakta bahwa keluhan konsumen adalah hak serta kewajiban pelaku usaha adalah mendengarkan hak atas keluhan, maka pelaku usaha harus mematuhi hak tersebut. Ditambah lagi bahwa pengelolaan keluhan yang baik juga akan berdampak bagi kelangsungan usaha.

Lebih lanjut, perihal keputusan hakim tersebut peneliti kaji berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ide dasar dari lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah karena konsumen berada dalam yang timpang dibandingkan dengan pelaku usaha maka konsumen wajib untuk dilindungi. Tujuan dari lahirnya hukum perlindungan konsumen adalah meniadakan tindakan sewenang-wenang yang justru dapat merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.

Kepastian hukum wajib untuk ditegakkan agar melindungi hak-hak konsumen, Dengan beralakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta mekanisme perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang setara dengan pelaku usaha. Apabila hak-hak konsumen dilanggar oleh pelaku usaha, maka konsumen memiliki kewenangan untuk menggugat atau menuntut pelaku usaha.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun sampai dengan saat ini masih terdapat permasalahan dalam upaya perlindungan yang ada. Permasalahan-permasalahan yang ada akan menambah upaya penegak hukum tersebut. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin diketahui permasalahan perlindungan Konsumen antara lain yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi.

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan diatas, peneliti dalam perkara aquo menyimpulkan bahwa putusan yang diberikan oleh hakim sudah sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Hakim dalam perkara ini menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Stella adalah hak Stella sebagai seorang konsumen. Hak tersebut sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pelaku usaha wajib untuk mendengarkan dan menerima keluhan atas barang/jasa yang dijualnya.

PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI ANCAMAN KRIMINALISASI MENGGUAKAN INSTRUMEN UU ITE DITINJAU DARI SKB TENTANG IMPELEMNTASI UU ITE

Analisis SKB tentang Implementasi UU ITE sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dari Kriminalisasi

SKB tentang implementasi UU ITE adalah kesepakatan bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. SKB UU ITE mengatur acuan bagi aparat penegak hukum dilingkungan Kominfo, Kepolisian dan Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum pidana yang diatur dalam ketentuan UU ITE.

SKB UU ITE memuat mekanisme penegakan hukum terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah oleh masyarakat. Pasal tersebut antara lain:

- a. Pasal 27 ayat (1), yang pada intinya mengatur tentang bagi setiap orang dilarang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- b. Pasal 27 ayat (2), yang pada intinya mengatur tentang bagi setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- c. Pasal 27 ayat (3), yang pada intinya mengatur tentang bagi setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

- dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- d. Pasal 27 ayat (4), yang pada intinya mengatur tentang bagi setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
 - e. Pasal 28 ayat (1), yang pada intinya mengatur tentang bagi setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
 - f. Pasal 28 ayat (2), yang pada intinya mengatur tentang bagi setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
 - g. Pasal 29, yang pada intinya mengatur tentang bagi setiap orang dilarang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
 - h. Pasal 36 UU ITE, yang pada intinya mengatur tentang bagi setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Keseluruhan pasal tersebut diatas dianggap oleh masyarakat bermasalah. Muncul desakan agar dilakukan revisi terhadap ketuan pasal-pasal yang bermasalahan tersebut. Namum pemerintah lebih memilih menerbitkan SKB daripada melakukan revisi terhadap UU ITE.

Tujuan diterbitkannya SKB UU ITE diharapkan dapat menguatkan posisi ketentuan peradilan pidana sebagai *ultimum remidium*. *Ultimum remidium* adalah pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum. Dengan demikian, SKB ini diharapkan agar penegakan hukum terhadap pasal-pasal yang termuat dalam SKB dapat ditelaah secara objek oleh penegak hukum serta dapat diselesaikan tanpa harus diajukan ke pengadilan.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah pasal yang paling sering digunakan sebagai upaya kriminalisasi terhadap konsumen. Pasal tersebut berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik”. Frasa “pencemaran nama baik” yang tidak didefinisikan secara jelas dalam UU ITE menyebabkan Pasal ini dianggap multitafsir.

Pada dokumen SKB, terdapat 12 point pedoman yang mentaru tentang ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Poin-poin implementasi adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku;
- b. Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE;
- c. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan;
- d. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat

- Penegak Hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE;
- e. Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian;
 - f. Korban sebagai pelapor harus perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan;
 - g. Fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dengan maksud mendistribusikan / mentransmisikan / membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP);
 - h. Unsur “supaya diketahui umum” (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (klacht delict) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus terpenuhi;
 - i. Kriteria “supaya diketahui umum” dapat dipersamakan dengan “agar diketahui publik”. Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian tidak saling mengenal;
 - j. Kriteria “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*);
 - k. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarakan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan;

- I. Untuk pemberitaan internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).

Keseluruhan poin implementasi di atas, mengatur batasan-batasan perihal penafsiran Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Pembatasan penafsiran pasal tersebut dapat digunakan sebagai sarana perlindungan hukum dari upaya kriminalisasi terhadap konsumen. Dengan demikian, SKB dapat digunakan sebagai sarana perlindungan hukum terhadap konsumen.

Pertama adalah perihal penafsiran atas unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. SKB menghendaki agar dalam upaya merespon aduan perihal tindak pidana yang disangkakan dalam pasal 27 ayat (3), Penegak hukum wajib merujuk pada ketentuan pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Penafsiran yang termuat dalam pasal 310 KUHP adalah delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku.

Kesepakatan yang mengatur bahwa penegakan hukum pasal 27 ayat (3) harus berdasarkan tafsir yang diatur dalam KUHP telah mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen. Rumusan pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik tidak memiliki batasan yang jelas padahal pasal tersebut adalah delik aduan. Akibatnya dari tidak jelasnya tafsir tersebut, menurut penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dan Taduri dapat menyebabkan pembatasan kebebasan beropini yang dijamin oleh konstitusi dan Hak Asasi Manusia, kurang terjaminnya kepastian hukum, berpotensi terjadinya overkriminalisasi, ketidakefektifan pada pasal tersebut akibat duplikasi pada klausa Penghinaan KUHPidana, Tindakan sewenang-wenang terhadap penentuan para terdakwa oleh para penegak keadilan.

Jika berdasar pada dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE disandingkan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP, maka pembatasan unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat

dibatasi dengan jelas. Batasan tersebut dapat diklasifikasi menjadi dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri atas perbuatan tersebut harus menyerang, objek yang diserang adalah kehormatan dan /atau nama baik, perbuatan yang dilakukan tersebut harus berupa menuduh perbuatan tertentu. Unsur Subjektif sendiri mensyaratkan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan harus dengan maksud tertentu.

Pada kasus kriminalisasi yang dialami oleh konsumen, umumnya frasa “pencemaran nama baik” menjadi alat guna untuk melakukan pemidanaan terhadap konsumen. Kasus Stella adalah contoh utama yang dapat dijadikan rujukan. Klinik L’VIORS menafsirkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Stella adalah untuk mencemarkan nama baik Klinik. Dengan ketentuan SKB tersebut, maka penegak hukum harus mampu terlebih dahulu menemukan unsur kesalahan terlapor. Pembatasan yang jelas tentang harus mengacu pada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dapat menjadi panduan bagi penegak hukum. Akibatnya tidak ada lagi kasus seperti Stella, yang mana tindakan “keluhan” yang merupakan hak konsumen dapat diartikan sebagai “pencemaran nama baik” oleh pelaku usaha.

Kedua adalah korban yang berwenang untuk melaporkan. Implementasi SKB mensyaratkan bahwa pelapor harus perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Meskipun terdapat kontradiksi antara rumusan SKB dengan UU ITE yang menyebutkan bahwa badan hukum memiliki hak untuk melaporkan, tetapi keputusan SKB tersebut dapat dinyatakan berpihak pada upaya perlindungan konsumen.

Pada kasus yang dialami Stella, Pelapor adalah sebuah korporasi dan berbadan hukum PT. Jika mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kondisi antara konsumen dan korporasi tidak seimbang dan timpang. Ketimpangan inilah yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian maka ketentuan implementasi SKB tersebut memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Penegak hukum harus mampu memiliki persepsi bahwa konsumen memiliki hak-hak yang dilindungi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kondisi yang terjadi selama ini adalah Aparat penegak hukum dinilai cenderung pilih kasih, membela penguasa atau pemilik modal, ketimbang rakyat jelat. Implementasi SKB ini memberikan mendorong penegak hukum agar objektif dalam menangani perkara yang ada.

Ketiga adalah fokus pemidanaan. Implementasi SKB mengarahkan penegak hukum agar berfokus pada pemidanaan yang berbasis pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (*dolus*), bukan pada perasaan korban. Pemidanaan tersebut mengacu pada prinsip pemidanaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 310 KUHP.

Kondisi yang terjadi selama ini adalah bahwa penyebab Pasal 27 ayat (3) menjadi pasal karet adalah karena fokus pemidanaan berdasarkan persanaan korban. Menurut Wirjono Prodjodikoro ukurannya perasaan adalah sesuatu yang objektif, karena hanya ada pada korban saja. Tolak ukur tersebut menyebabkan konsumen rawan untuk dikriminalisasi, karena tindakan keluhan ataupun hak-hak lain dapat dimaknai berbeda oleh pelaku usaha.

Impelentasi fokus pemidanaan yang bergeser tersebut memberikan proyeksi perlindungan bagi konsumen. Aparat penegak hukum dituntut untuk fokus pada perbuatan yang dilakukan oleh konsumen tersebut apakah adalah sebuah kesengajaan atau bukan. Dengan mampu mengumpulkan bukti permulaan yang cukup tentang tindakan kesengajaan, maka laporan tidak serta merta langsung diajukan ke pengadilan.

Keempat adalah frasa “diketahui umum”. Implementasi SKB mendefinisikan pengertian “diketahui umum” adalah tindakan unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses oleh publik. Apabila unggahan hanya dilakukan pada rana privat seperti dalam unggahan percakapan grup, maka tidak dapat dikategorikan sebagai akses public, karena sifatnya yang terbatas.

Implementasi SKB ini memberikan perlindungan hukum terhadap kosumen karena membatasi unsur diketahui umum. Pembatasan tersebut menyebabkan tindakan pencemaran nama baik dapat terbukti dilakukan apabila tindakan tersebut ditransmisikan di platfon medsos yang dapat diakses dengan mudah oleh publik. Dengan pembatasan tersebut, maka apabila keluhan pada ruang privat seperti personal chat atau grup chat yang anggotanya tertentu, tidak dapat disangkakan melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Pada kasus yang dialami oleh Stella, bukti utama berupa tangkapan layar bukti percakapan adalah chat pribadi stella dengan saksi-saksi perihal keluhannya. Jika tindakan tersebut hanya sebatas pada personal chat, maka tidak dapat disangkakan sebagai sebuah unsur diketahui umum. Namun unsur menjadi terpenuhi ketika Stella membagikan tangkapan

layar tersebut di Instastory, sehingga akses nya menjadi terbuka untuk publik dan unsur diketahui umum menjadi terpenuhi.

Berdasarkan pembahasan yang sudah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa SKB Implementasi UU ITE telah memberikan perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan tersebut terlihat dari batasan-batasan unsur pidana yang diperjelas karena merujuk pada pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Selain itu Implementasi SKB juga menyeimbangkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, serta memberikan rambu-rambu tentang sejauh mana tindakan keluhan dapat disampaikan sehingga tidak dapat serampangan menjadi tindakan “diketahui umum. Keseluruhan pedoman implementasi tersebut dapat dijadikan dasar oleh aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Urgensi Penerapan SBK tentang Implementasi UU ITE dalam Upaya Perlindungan

Konsumen dari Kriminalisasi

SKB UU ITE dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan tujuan agar asas *ultimum remidium* dapat ditegakkan. Landasan utama dari penerapan tersebut karena selama ini aparat penegak hukum tidak mengindahkan asas tersebut dan cenderung langsung melakukan penindakan hukum terhadap masyarakat yang diadukan dengan UU ITE. Melalui berlakunya SKB UU ITE, diharapkan hukum pidana merupakan senjata atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

Asas *ultimum remidium* juga terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dengan terlebih dahulu ditempuh diluar pengadilan. Tujuannya agar untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Namun apabila penyelesaian sengketa tidak tercapai, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hadirnya sanksi pidana dalam peraturan perlindungan konsumen merupakan bentuk *ultimum remedium* apabila upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen melalui jalur hukum lainnya tidak dapat diselesaikan.

Ketimpangan antara mekanisme penyelesaian perkara antara konsumen yang dengan pelaku usaha yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa masih terdapat upaya perlindungan hukum juga terhadap pelaku usaha. Dengan demikian, pelaku usaha juga wajib memperhatikan upaya perlindungan konsumen, yang dalam hal ini bila konsumen melakukan kesalahan maka sengketa seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum diluar pengadilan. SKB UU ITE memaksa pelaku usaha untuk melakukan penyelesaian yang sama, sehingga aparat penegak hukum dapat melakukan mediasi agar tidak terjadi proses penegakan hukum pidana yang merugikan konsumen.

Implementasi SKB UU ITE harus segera diterapkan oleh aparat penegak hukum. Penerapan harus dilakukan guna menjamin hak-hak kebebasan berekspresi konsumen atas tindakan-tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen. Kasus yang dialaim oleh Stella adalah bukti terbaru bahwa selama ini Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah digunakan untuk merenggut hak-hak konsumen, namun jauh sebelum itu terdapat pula beberapa kasus yang menjerat konsumen sebagai berikut:

1. Kasus Pritha Mulyasari dengan Rumah Sakit OMNI

Kasus Pritha Mulyasari dengan Rumah Sakit OMNI adalah babak pertama konsumen dihadapkan dengan UU ITE. Pritha Mulyasari adalah seorang ibu yang anaknya menjadi pasien di Rumah Sakit OMNI Internasional. Pritha mengirimkan email berupa keluhan kepada teman-temannya sebagai curhat dan wujud kekecewaannya atas pelayanan publik di rumah sakit OMNI Internasional. Email tersebut berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutra Tanggaerang".

Email inilah yang kemudian dijadikan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk menjerat Pritha dengan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 310 ayat (2) juncto Pasal 311 ayat (1) KUHP dengan kasus tindak pidana pencemaran nama baik. Atas jerat pasal tersebut, Pritha kemudian ditahan dan dituntut dimuka pengadilan. Pada putusan di pengadilan negeri, Pritha dinyatakan tidak bersalah. Penuntut umum kemudian mengajukan banding dan kemudian banding tersebut diterima sehingga menyatakan Pritha bersalah. Pritha kemudian mengajukan kasasi dan kasasi tersebut diterima dan menyatakan Pritha tidak bersalah.

2. Kasus Azril Sopandi

Kasus kedua adalah kasus yang dialami oleh Azril Sopandi. Azril Sopandi adalah seorang Direktur PT. Tripat yang dijerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Azril dipolisikan oleh rekan bisnisnya mengirim pesan lewat Facebook messenger kepada Dede Apriad.

Atas laporan tersebut Azril kemudian ditahan. Tidak terima dengan kasus yang menjeratnya, Azril kemudian mengajukan praperadilan. Putusan praperadilan menolak permohonan dia, sehingga kasusnya terus berlanjut dan Azril dinyatakan bersalah atas kasus yang dihadapinya.

3. Kasus dr. Richard Lee

Kasus ketiga adalah kasus yang menjerat seorang dokter dan influencer yaitu dr. Richard Lee. Richard Lee diadukan oleh Kartika Putri karena melakukan review atas sebuah produk kosmetik di media sosial miliknya. Richard Lee kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Tidak terima dengan penetapan tersangka yang ditujukan kepadanya, kemudian Richard Lee mengajukan praperadilan. Putusan praperadilan mengabulkan permohonannya dan menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dialaminya tidak sah. Atas putusan tersebut, maka status hukum Richard Lee dipulihkan dan pidana yang disangkakan terhadapnya menjadi gugur.

Ketiga kasus diatas merupakan kasus-kasus yang menghadapkan konsumen dengan pelaku usaha. Pelaku usaha merasa nama baiknya dicemarkan kemudian melaporkan konsumen mereka masing-masing dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kasus yang menimpa Pritha dan Azril menunjukkan bahwa pada saat itu, aparat penegak hukum belum mampu mengetahui batasan ruang lingkup tetang batasan transmisi elektronik itu sejauh mana. Tindakan Pritha dan Azril yang mengirimkan pesan melalui media sosial pada ruanglingkup privat diartikan sebagai sebuah tindakan pencemaran nama baik hanya dengan mengakses media elektorik. Padahal tindakan yang dilakukan hanya ditujukan terhadap orang-orang tertentu sehingga termasuk dalam ranah privat. Berbeda dengan dua kasus pertama, kasus yang dialami oleh Richard Lee menunjukkan bahwa penegak hukum tidak memiliki pemahan tentang hak konsumen untuk menegemukakan pendapat atas produk yang dikonsumsinya. Richard Lee sebelum melakukan review telah mengkonsumsi dan melakukan riset terhadap

produk yang diriviewnya, namun penegak hukum tidak mempedulikan tindakan riset yang dilakukan dan hanya fokus pada tindakan meriview produk yang dianggap merugikan pelaku usaha melalui media sosial yang dimilikinya.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidakpahaman aparat penegak hukum menafsirkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Melalui Implementasi SKB UU ITE, diharapkan penegak hukum memiliki penafsiran yang kongkrit tentang unsur pidana apa saja yang terdapat dalam UU ITE. SKB UU ITE memiliki urgensi genting untuk dipahami dan diterapkan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak ada lagi konsumen yang diadukan secara serampangan oleh pelaku usaha. Dengan demikian prinsip perlindungan hukum terhadap konsumen dapat tercapai.

Kelemahan dalam Penerapan SBK tentang Implementasi UU ITE dalam Upaya Perlindungan Konsumen

Berlaku SKB UU ITE tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam upaya perlindungan terhadap konsumen dari kriminalisasi. Terdapat beberapa kelemahan yang penulis temukan terkait dengan implementasi SKB UU ITE. Kelemahan-kelemahan SKB UU ITE adalah sebagai berikut:

Pertama adalah soal kedudukan hukum SKB UU ITE sebagai sebuah produk hukum. Pemerintah dalam keterangan resminya menyatakan bahwa SKB UU ITE bukan sebuah produk hukum. Keterangan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. SKB dibentuk guna mengisi kekosongan hukum yang ada perihal penafsiran UU ITE yang dilakukan oleh penegak hukum, dengan tujuan agar aparat penegak hukum seragam dalam penafsirannya.

Meskipun pemerintah memberikan keterangan bahwa SKB UU ITE bukan sebuah produk huku, namun dalam yang dilakukan oleh Defi Sri Sunardi Ramadhani, Setiawan Noerdajasakti dan Faizin Sulistio justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa SKB UU ITE mempunyai kedudukan yang sama dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan meskipun secara eksplisit tidak tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kontradiksi antara pendapat pemerintah dan hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa tidak terdapat konsistensi terkait status SKB UU ITE sebagai sebuah produk hukum. Inkonsistensi tentang status SKB UU ITE sebagai sebuah produk hukum dapat merugikan masyarakat karena dapat menjadikan SKB tidak dapat berlaku efektif. Jika ditinjau dari teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma-norma hukum harus dipatuhi dan diterapkan oleh masyarakat sehingga hukum menjadi efektif., maka SKB UU ITE tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kedua adalah perihal keberlakuan SKB UU ITE. Isi ketentuan yang ada didalam SKB dengan jelas menyebutkan bahwa SKB UU ITE hanya berlaku bagi aparat penegak hukum dilingkungan KOMINFO, POLRI dan KEJAKSAAN. Ketentuan tersebut sesuai dengan fungsinya sebagai Surat Keputusan Bersama antara Lembaga negara lintas sektoral. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Maria Farida yang menyatakan bahwa Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kementerian Negara dan Kementerian Koordinator atau dalam hal ini jika surat keputusan dibentuk antar lembaga negara atau kementerian koordinator maka peraturan itu hanya berlaku diantara lembaga dan kementerian tersebut.

Akibat keberlakuan SKB UU ITE yang hanya berlaku bagi pihak-pihak yang disebutkan didalamnya berpotensi untuk tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya konsumen yang diadukan. Sebab SKB hanya berlaku untuk kalangan tertentu dan fokusnya hanya para perihal penegakan hukum. SKB sejatinya tidak mengganti rumusan norma pidana yang ada didalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. SKB hanya dijadikan sebagai dasar pedoman tanpa disertai dengan sanksi. Kondisi tersebut yang membuat SKB menjadi tidak terikat sehingga dasar penggunaannya menjadi subjektif sesuai dengan pertimbangan masing-masing instansi.

Kedua permasalahan tersebut perihal kedudukan hukum SKB serta keberlakuan SKB menjadi tantangan dalam upaya perlindungan terhadap konsumen. SKB UU ITE menjadi lemah karena sifatnya yang tidak mengikat. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan tidak adanya mekanisme sanksi bila SKB tersebut tidak dijalankan. Akibatnya upaya perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi tidak optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan pada BAB II dan BAB III, maka kesimpulan yang penulis peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan pertama yang penulis bahas adalah perihal analisis putusan perkara 658/PID.SUS/2021/PN.SBY Ditinjau Dari Teori Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Bebas yang diterima oleh Stella sudah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap konsumen. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tindakan Stella yang menjadi tuntutan penuntut umum adalah sebuah keluhan, bukan sebagai sebuah pencemaran nama baik. Tindakan “Keluhan” merupakan hak Stella sebagai seorang konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 4 angka (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang pada intinya menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Putusan tersebut juga sebagai wujud nyata pengakuan terhadap hak-hak konsumen sehingga dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap konsumen dari kriminalisasi UU ITE.
- b. Permasalahan kedua yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah perihal perlindungan konsumen dari ancaman kriminalisasi menggunakan instrumen UU ITE ditinjau dari SKB tentang implemtnasi UU ITE. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa berlakunya SKB UU ITE dapat digunakan sebagai instrument perlindungan hukum bagi konsumen dari jerat pidana UU ITE. SKB memiliki urgensi untuk diberlakukan terhadap seluruh kasus yang menjerat konsumen dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik. Sebab kondisi yang terjadi selama ini, aparat penegak hukum terlalu gegabah dalam melakukan penegakan hukum terkait kasus yang melibatkan konsumen dengan pelaku usaha. Dengan diberlakukannya SKB UU ITE, maka penegak hukum memiliki batasan yang jelas tentang unsur-unsur pencemaran nama baik dan mampu untuk memberikan pengakuan terhadap hak-hak konsumen sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen dapat diwujudkan. Meskipun begitu, bukan berarti SKB ini tanpa cela, perihal inkonstitensi kedudukan SKB UU ITE sebagai produk hukum dan subjektifitas penggunaan SKB UU ITE menjadi

tantangan bagi konsumen dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Persada Utaman, Tangerang Selatan, 2017
- Gusti Ayu, et al, *Manajemen Kualitas*, Yayasan Cendika Mulia Mandiri, 2022.
- Heryanti, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2017
- Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Sunyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Sleman, 2018.
- Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta, 2000.
- Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2020.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Adang Moelyono, "Teori Kebijakan Kriminalisasi Terkait Perumusan Sanksi Pidana dalam Peraturan Desa", *Jurnal Independent* Vol. 5, No. 2, 2017.
- Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1).
- Alicia Lumenta, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE", *Jurnal Lex Crimen* Vol. 9, No. 1, 2020.
- Darmika, I. M. R., Dewi, S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindakan Kriminalisasi Terhadap Seseorang Dengan Menggunakan Instrumen Undang-Undang ITE. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2).
- Fithri, Beby Suryani, Riswan Munthe, and Anggreni Atmei Lubis. "Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 4.1 (2021): 68-83.
- Mainake, Y., & Nola, L. F. (2020). Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 12(16).

- Marthen H. Toelle, "Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (*Criminal Law Theory*), *Jurnal Refleksi Hukum* Vol 8, No. 2, 2014.
- Maratun Fitriah, Mar, and Nur Wahyuni Utami. "Menyoal Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama Menteri dalam Rangka Penanganan Covid-19 Sebagai Upaya Penataan Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19.2 (2022): 279-291.
- Nyoman Serikat P, Bambang Eko Turisno, R. E. P. (2016). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4).
- Ramadhani, Defi Sri Sunardi, Setiawan Noerdajasakti, and Faizin Sulistio. "Kedudukan Surat Keputusan Bersama sebagai Pedoman Implementasi Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7.2 (2022): 375-383.
- Rachmawati, Fairus Augustina, and Januari Nasya Ayu Taduri. "Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik: Implications of the Multi-interpretation Article of the ITE Law on the Elements of Humiliation and Defamation." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol. 7. No. 2. 2021, h. 491-508.
- Rini Retno Winarni, "Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE dalam Tindak Pidana *Cyber Crime*", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 14, No. 1, 2016.
- Silaen, August. "PENEGAKAN HUKUM PELAKU DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan Nomor: 4/Pid. C/2020/PN. TLK)." *Jurnal Hukum PATIK* 9.3 (2020): 215-226.
- Sinaga, Niru Anita, and Nunuk Sulisrudatin. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5.2 (2018). h. 71-87.
- Andi Saputra, Kirim Pesan di Facebook Dipidanakan, Dirut: Nama Baik Saya Hancur, <https://news.detik.com/berita/d-3448369/kirim-pesan-di-facebook-dipidanakan-dirut-nama-baik-saya-hancur#!>, diakses 10 Januari 2022.
- Andita Rahma, Pemerintah: SKB UU ITE Bukan Produk Hukum, <https://nasional.tempo.co/read/1476177/pemerintah-skb-uu-ite-bukan-produk-hukum>, diakses pada 15 Januari 2022.
- Anonim, Putusan PK Prita Mulyasari: Catatan Bersejarah Kehidupan Kebebasan Berekspresi di Indonesia, <https://icjr.or.id/putusan-pk-prita-mulyasari-catatan-bersejarah-kehidupan-kebebasan-berekspresi-di-indonesia/>, diakses 10 Januari 2022.
- Divisi foe, Kasus Stella Monica, <https://safenet.or.id/id/2021/10/kasus-stella-monica/>, diakses pada 3 November 2022.
- Tempo.co, Hakim Vonis Bebeas Stella Monica, Terdakwa Pencemaran Nama Klinik Kecantikan, <https://nasional.tempo.co/read/1539299/hakim-vonis-bebas-stella-monica-terdakwa-pencemaran-nama-klinik-kecantikan>, diakses pada 4 November 2022.
- Pratiwi Agustini, Pemerintah Tandatangani SKB UU ITE, <https://aptika.kominfo.go.id/2021/06/pemerintah-tandatangani-skb-uu-ite/>, diakses pada 3 November 2022.
- Vika Azkiya Dihni, Korban Kriminalisasi UU ITE Menurun pada 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/29/korban-kriminalisasi-uu-ite-menurun-pada-2021>, diakses pada 3 November 2022.

Yogi Ernes, Richard Lee Menang Praperadilan, Polisi Diminta Kembalikan Barang Bukti, <https://news.detik.com/berita/d-6412987/richard-lee-menang-praperadilan-polisi-diminta-kembalikan-barang-bukti>, diakses 10 Januari 2022.

PUTUSAN NOMOR 658/PID.SUS/2021/PN SBY

Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.